

www.rakyatmerdekaonline.com

SIMPOSIUM ISLAM DAN DEMOKRASI (3)

Nikolaos van Dam: Demokrasi dan Islam Bisa Berjalan Bersama

Selasa, 15 November 2011 , 01:53:00 WIB

Laporan: A. Supardi Adiwidjaya



VAN DAM/RMOL

RMOL. Masih saja ada orang Barat yang berpikiran bahwa Islam dan demokrasi itu tidak komaptibel, dan tidak bisa hidup berdampingan. Padahal faktanya, di negara-negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, demokrasi bisa berjalan; Islam dan Demokrasi bisa hidup berdampingan serta berjalan bersama.

Demikian disampaikan mantan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik

Indonesia, Dr Nikolaos van Dam, kepada **Rakyat Merdeka Online**, di sela-sela

simposium internasional bertemakan Islam dan Demokrasi di Hotel Eden Babylon,

Den Haag (Kamis, 3/11).

Van Dam menegaskan bahwa tidak ada kaitan apapun antara agama dan demokrasi. Sebagai contoh, di Eropa dulu, ada tiga pemerintahan diktator bahkan fasis yang kejam sekali; Nazi Hitler di Jerman, Franco di Spanyol, dan Fasis Mussolini di Italia. Dan sebagian besar penduduk di negara-negara tersebut adalah beragama Kristen.

"Sehubungan dengan itu, apakah bisa kita mengatakan bahwa Kristen dan demokrasi tidak bisa berjalan bersama?

Kalau saya mengatakan bahwa Kristen dan demokrasi tidak bisa berjalan bersama, maka orang di Barat pasti akan menjawab bahwa itu nonsense," kata van Dam.

Sekarang ini di seluruh Eropa Barat, kata van Dam, yang penduduknya sebagian besar beragama Kristen dengan Kitab Injil, pasti tidak akan setuju bila dikatakan Kristen tidak sejalan dengan demokrasi. Demikian juga sebenarnya dengan agama Islam.

Van Dam memberi contoh, di Pakistan, Bangladesh, Turki ataupun Nigeria, yang mayoritas penduduknya adalah muslim, ternyata demokrasi berjalan. Begitu juga dengan India, meskipun agama Islam bukan mayoritas, tapi sekitar 161 juta jiwa warganya adalah muslim, satu jumlah yang hampir sama dengan penduduk yang beragama Islam di Pakistan. Begitu juga dengan di Syria dan di Libanon, yang terdapat nilai-nilai demokrasi. Bahkan Tunisia pun sekarang sedang digelar Pemilu.

Namun sayang, lanjut van Dam, di Barat, masih saja ada orang yang takut bila orang Islam memegang pemerintahan. Mereka mengira penguasa muslim tidak menghormati sistem demokrasi. Padahal di Jerman dulu, yang sebagian besar berpenduduk Kristen, Hitler menang melalui Pemilu, namun kemudian membentuk pemerintahan fasis yang jelas-jelas tidak menghormati sistem demokrasi.

"Di dunia Barat secara umum orang tidak mau mengerti hasil Pemilu kalau tidak berjalan sesuai dengan yang mereka nantikan atau harapkan," kata van Dam.

Van Dam memberi contoh, Barat mengendaki ada Pemilu di Palestina sebagai indikator negara demokrasi. Namun setelah Pemilu digelar dan dimenangkan oleh HAMAS, orang Barat menolaknya dan menilai sebagai kemenangan kaum fundamentalis. Begitu juga yang terjadi di Aljazair pada era 1990-an ketika Pemilu dimenangkan oleh FIS atau gerakan Islamic Salvation Front. Barat terkejut dan mereka tidak pernah menghormati hasil Pemilu.

Contoh lain, lanjut van Dam, Barat menilai salah satu indikator demokrasi adalah ada ruang terhadap kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Namun ketika ada TV Aljazeera, yang mempunyai kemungkinan untuk mengucapkan atau menyiarkan berdasarkan kebebasan berpendapat, banyak orang Barat tidak menyukainya, terutama dalam perang Irak. Mereka tidak menyukai Aljazeera dan pusat TV Aljazeera di Baghdad dibombardir, dan direktornya dibunuh.

"Jadi pertanyaan yang sangat penting: Kalau ada orang yang mengatakan Islam dan demokrasi tidak bisa berjalan bersama dengan baik, siapa yang harus membuktikan baik atau tidaknya, sah atau tidak sahnya itu. Jadi kalau mereka mengatakan Islam dan demokrasi tidak berjalan bersama dengan baik mereka harus membuktikan bahwa itu sah atau tidak, bukan orang lain. Tapi secara umum publik mengatakan ya itu sah, tapi itu tidak sah," kata van Dam

"Oleh karena itu, menurut saya, tidak ada kaitan antara agama dan sistem pemerintahan, baik yang positif maupun negatif," jelas van Dam.

Van Dam menambahkan bahwa hubungan agama dan demokrasi tergantung pada attitude atau pendirian seseorang ataupun kelompok, kalangan tertentu. Sebagai contoh di Indonesia, ada banyak orang dan organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama yang masing-masing mewakili sebagian besar dari umat Islam masyarakat Indonesia. Dan Islam tidak sepenuhnya sama di seluruh dunia Islam, oleh karena banyak orang muslim yang mempunyai kultur, kebudayaan yang berbeda.

Sebagai contoh, seorang muslim di Maroko berbeda dengan seorang muslim di Indonesia, meskipun agamanya sama. Karena itu meskipun prinsip Islam sama, namun memiliki beberapa kebudayaan dan itu memperjelas bahwa seorang muslim Indonesia lebih terbuka pada demokrasi dibanding dengan yang lain. *(Bersambung)* [ysa]